



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 21 TAHUN 2012

TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang pembagian dan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 28 Tahun 2011 tentang penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan penggunaan dan tata cara penyaluran serta pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu melakukan penyesuaian dan penyempurnaan Peraturan Bupati Sampang Nomor 28 tahun 2011;
- c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang Tahun 2012 dengan Peraturan Bupati Sampang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Thun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1985 tentang Besarnya Prosentase Nilai Jual Kena Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Bonor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemrintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembagian dan Penggunaan biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi Jawa Timur (Berita Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 26/E1);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 12);

20. Peraturan.....

20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sampang.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset selanjutnya di singkat DISPENDALOKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sampang selaku Pengguna Anggaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan di gunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan.

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA – SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang di pakai sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Penggunaan Anggaran DISPENDALOKA.
9. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Sampang.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak penerimaan besarnya pajak terhutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta mengawasi penyetorannya.
11. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah yang selanjutnya disebut biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Dana yang digunakan untuk biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan biaya operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sampang.
12. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

BAB II PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Daerah menerima dana transfer biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan.
- (2) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah adalah sebesar 9% (sembilan perseratus)
- (3) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai imbalan biaya pemungutan antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari target pada tahun bersangkutan.
- (4) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke rekening umum kas daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah serta tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dispendaloka.

Pasal 3

Besarnya Imbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) adalah biaya pemungutan diterima oleh Pemerintah Kabupaten adalah :

- a. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan adalah jumlah realisasi dari penerimaan kali 9% (sembilan perseratus) kali 85% (delapan puluh lima perseratus);
- b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan adalah jumlah realisasi penerimaan kali 9% (sembilan perseratus) kali 75% (tujuh puluh lima perseratus);
- c. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutani adalah jumlah realisasi dari penerimaan kali 9% (sembilan perseratus) kali 30% (tiga puluh perseratus);
- d. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan adalah jumlah realisasi dari penerimaan kali 9% (sembilan perseratus) kali 25% (dua puluh lima perseratus);

BAB III

PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 4

(1) Penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diatur sebagai berikut :

- a. Biaya pemungutan sektor Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dipergunakan untuk biaya insentif bagi :
 1. Aparat pemungut Tingkat Desa dan Kelurahan;
 2. Aparat pemungut Kecamatan;
 3. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Biaya pemungutan sektor Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dipergunakan untuk biaya insentif bagi :
 1. Aparat pemungut Tingkat Desa dan Kelurahan;
 2. Aparat pemungut Kecamatan;
 3. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;

- c. Biaya pemungutan sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan dipergunakan untuk biaya insentif bagi Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
 - d. Biaya pemungutan sektor Pajak Bumi dan Bangunan pertambangan dipergunakan untuk biaya insentif bagi :
 - 1. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
 - 2. Aparatur pemungut pada DISPENDALOKA
 - 3. Pemberian piagam penghargaan dan hadiah atas pelunasan Pajak Bumi dan bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan kepada para Camat dan Kepala Desa/ Lurah di Kabupaten Sampang
 - 4. Biaya operasional bagi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. Kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. Kegiatan sosialisasi, koordinasi / konsultasi, dan monitoring serta evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. Kegiatan lain dalam menunjang kelancaran tugas Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Untuk penggunaan biaya pemungutan Pajak dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan pagu prosentase pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

BAB IV PENCAIRAN

Pasal 5

Pencairan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2012.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pertanggungjawaban biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berupa berita acara penyerahan uang beserta kwitansi yang memuat besaran uang, daftar yang telah ditandatangani oleh pejabat dan aparat daerah atau data pendukung lainnya sebagai bukti pertanggungjawaban.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 11 APRIL 2012

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 11 APRIL 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

Ir. TONTOWI, MM, MBA

Pembina Utama Muda

NIP. 19570217 198503 1 006

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 21

Sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SAMPANG

Kepala Bagian Hukum

ttd.

JUWAINI, SH

Pembina

NIP 19670408 199602 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG
 NOMOR : 21 TAHUN 2012
 TANGGAL : 11 APRIL 2012

PAGU PROSENTASE PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SAMPANG

NO	URAIAN	PROSENTASE BIAYA PEMUNGUTAN			
		Pedesaan	Perkotaan	Perhutanan	Pertambangan
A	B	C	D	E	F
1	Bupati Sampang	1.50	3.50	16.00	6.50
2	Wakil Bupati Sampang	1.00	3.00	14.50	5.50
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang	0.95	2.75	14.00	5.25
4	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	0.80	2.50	12.50	4.75
5	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan	0.65	2.00	9.00	2.00
6	Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	0.50	1.50	5.00	3.00
7	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	0.40	1.25	4.00	2.50
8	Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	0.30	0.50	2.50	1.50
9	Kepala Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	0.30	0.50	2.50	1.50
10	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang	0.20	0.35	2.00	1.75
11	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang	0.20	0.35	2.00	1.75
12	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	0.20	0.35	2.00	0.75
13	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Sampang	-	-	-	1.50
14	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	0.20	0.35	2.00	0.75
15	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	0.20	0.35	2.00	0.75
16	Kepala Seksi Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	0.40	1.25	3.50	2.00
17	Kepala Seksi Pengembangan Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	0.30	1.00	3.50	1.75
18	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	0.20	0.45	2.00	1.25
19	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	0.10	0.20	1.00	0.50
20	Aparat Pemungut pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	-	-	-	15.00
21	Aparat Pemungut Kecamatan	16.00	20.00	-	-
22	Aparat Pemungut Desa dan Kelurahan	75.60	57.85	-	-
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	24.25
24	Operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	1.50
25	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	-	1.50

A	B	C	D	E	F
26	Sosialisasi, Koordinasi/Konsultasi, dan Monitoring serta Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	3.00
27	Pemberian Piagam Penghargaan dan Hadiah atas Pelunasan PBB sektor pedesaan dan perkotaan kepada para Camat dan Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sampang	-	-	-	9.00
28	Kegiatan lain yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas PBB				0.50
		100.00	100.00	100.00	100.00

BUPATI SAMPANG,
ttd

NOER TJAHJA